BUPATI WONOSOBO

SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO PADA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN WONOSOBO JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN WONOSOBO TERHADAP RANCANGAN APBD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025

SELASA, 12 NOVEMBER 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Yang saya hormati:

- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda;
- Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- Para pendengar Pesona FM, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada hari ini, Selasa, 12 November 2024, kita dapat bertemu kembali pada acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo, dalam rangkaian pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.

Mengawali sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo, yang telah memberikan pandangan umumnya terhadap Rancangan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal, terkait dengan pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD, terhadap Rancangan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

A. Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025. Tema pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2025 adalah "**Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah**".

Guna mendorong pencapaian tujuan pembangunan tersebut, arah kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2025 meliputi:

1. Pemantapan infrastruktur pada kawasan prioritas,
2. Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumber daya lokal,
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing,
4. Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah,
5. Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengurangan risiko bencana

Terdapat tiga hal yang menjadi fokus dalam pembangunan daerah tahun 2025, antara lain pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan peningkatan infrastruktur.

Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan menggunakan tiga pendekatan strategi, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan dengan stabilisasi ekonomi makro, seperti pengendalian inflasi, karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Jika inflasi naik, maka daya beli masyarakat miskin akan menurun, atau harus mengeluarkan biaya lebih agar dapat memenuhi kebutuhan. Strategi berikutnya adalah kebijakan percepatan belanja pemerintah pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan gedung, untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Percepatan distribusi subsidi meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi, pelaksanaan pelatihan ketrampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatan mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Disisi lain, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

a. Penurunan beban pengeluaran masyarakat

   Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, mendekatkan pelayanan, khususnya pada pelayanan kependudukan untuk mengurangi biaya transportasi, serta bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

b. Peningkatan pendapatan masyarakat
   Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
   - Peningkatan akses pekerjaan,
   - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program pelatihan,
   - Peningkatan akses terhadap akses pinjaman modal melalui subsidi bunga,
   - Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan,
   - Pengembangan usaha baik skala rumahan maupun UMKM mikro dan kecil.

c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan
   Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
   - Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
   - Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi, maka penanganan kemiskinan memerlukan konvergensi program maupun pendanaan, baik di level pusat maupun sampai ke desa serta melibatkan swasta dan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo, strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat, terutama dengan menurunkan kasus kematian ibu dan bayi dengan meningkatkan kualitas layanan sampai ke level posyandu, dengan dukungan pelaksanaan integrasi layanan primer, peningkatan cakupan jaminan kesehatan, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, pemenuhan SPM kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan.
2. Dalam dimensi pendidikan, untuk menjangkau anak-anak usia sekolah agar kembali bersekolah dan memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah, melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan guna mengurangi kesenjangan kualitas dan akses.

Beberapa strategi yang akan dilakukan adalah: meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pendekatan akses layanan, Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan dasar yang kuat bagi siswa agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, beasiswa dan Bantuan Pendidikan melalui Mayo Sekolah, serta pengembangan kurikulum yang relevan dan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.

3. Dimensi daya beli, antara lain melalui :
    - **Subsidi dan Bantuan Sosial**: Memberikan subsidi atau bantuan sosial untuk kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan daya beli mereka.
    - **Pemberdayaan Ekonomi**: Melalui pelatihan keterampilan dan dukungan untuk wirausaha, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka dan daya beli. Inisiatif seperti pemberdayaan UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan ekonomi lokal.
    - **Akses Terhadap Layanan Keuangan**: Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan diantaranya melalui KURDA.

Percepatan Penanganan Stunting

Program Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Wonosobo, telah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang berisi pedoman perencanaan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi.

Perencanaan intervensi penanganan stunting mengacu pada 8 aksi konvergensi berdasarkan identifikasi permasalahan dan kesenjangan layanan, untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan cakupan layanan yang diberikan. Pemerintah pusat telah memfasilitasi pengolahan analisis situasi melalui sistem pelaporan AKSI BANGDA Kemendagri dan digunakan oleh semua kabupaten/kota di Indonesia, sehingga perencanaan penanganan stunting sudah berdasarkan data yang dilaporkan oleh penyedia layanan yang berkontribusi dalam intervensi spesifik dan sensitif, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

Beberapa kesenjangan layanan yang belum optimal dan telah direncanakan di tahun 2025, seperti perluasan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja dengan melibatkan komunitas remaja, sekaligus untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi pencegahan anemia pola makan dan konsumsi TTD, peningkatan kualitas gizi bayi dan balita serta ibu hamil, peningkatan kapasitas kader, pemenuhan sanitasi dan air minum, memperluas jangkauan layanan KB gratis untuk menurunkan *unmetneed* layanan KB dan menurunkan 4T risiko kehamilan, serta penguatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader posyandu, dan pemerintah desa.

Perencanaan penentuan lokus stunting ditetapkan berdasarkan analisis situasi atas cakupan layanan, perkembangan kasus stunting sebagaimana yang telah terlaporkan dalam sistem pelaporan aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), dan keluarga risiko stunting. Penetapan lokus stunting juga telah melalui rapat teknis TPPS kabupaten yang nantinya akan disepakati pada Rembuk Stunting kabupaten.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk percepatan penurunan stunting diwujudkan melalui penyusunan regulasi, antara lain :

- Peraturan Bupati yang mengatur tentang peran desa dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif serta peran antar pihak dalam mendukung peran desa,
- Surat edaran tentang tindak lanjut hasil Rembuk Stunting, sebagai panduan bagi Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil Rembuk Stunting di tingkat kabupaten,
- Peraturan Bupati tentang penggunaan dana desa, disusun untuk mengatur penggunaan dana desa dalam mendukung percepatan penurunan stunting, serta
- Kolaborasi dengan masyarakat dan swasta serta lembaga pengumpul zakat seperti BAZNAS.

Penyelenggaraan Jalan

Atas apresiasi yang disampaikan terhadap capaian pembangunan infrastruktur, kami mengucapkan terima kasih, walaupun masih terdapat jalan-jalan yang belum tersentuh pembangunan maupun yang tidak layak dilalui kendaraan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berupaya mengidentifikasi ruas jalan kewenangan kabupaten, yang memiliki peran sebagai pendukung koridor-koridor tertentu, seperti koridor pendukung konektivitas pariwisata, koridor pendukung sentra produksi pangan pertanian, koridor kewilayahan utama, dan jalan afirmasi kawasan perbatasan/pinggiran yang agak terpencil.

Pemerintah Kabupaten juga telah membantu mengarahkan untuk usulan jalan kabupaten, yang diusulkan pada forum musrenbang, diprioritaskan pada jalan antar desa dan/atau jalan poros desa. Sementara itu, untuk jalan-jalan yang dianggap penghubung desa yang agak terpencil, menggunakan pendekatan afirmasi. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk pembangunan sektor infrastruktur yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan kapasitas fiskal terbatas, maka pembangunan jalan dilakukan berdasarkan prioritas tematik koridor pembangunan. Jalan-jalan yang memiliki fungsi koridor kewilayahan utama, koridor pendukung destinasi pariwisata, dan sentra produksi pangan pertanian akan lebih diperhatikan. Hal itu diindikasikan dapat memiliki daya ungkit terhadap dampak perekonomian wilayah. Kami sepakat dengan nantinya pembangunan infrastruktur, terutama jalan, dapat meningkatkan efisiensi mobilitas manusia, barang, dan jasa yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perekonomian yang tentunya didukung dengan semangat "**Sesarengan mBangun Wonosobo**".

Penanganan Sampah

Saat ini pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Lingkungan Hidup, sedang berproses melakukan upaya penanganan sampah habis di tempat, yang artinya masing-masing dari penghasil sampah dapat melakukan proses pengolahan sampah mulai dari rumah tangga, desa, kecamatan, dan pada akhirnya menyisakan residu sampah yang benar-benar tidak bisa diolah, barulah dibawa ke TPA.

Pengelolaan sampah di tingkat desa dan/atau kecamatan ini juga diarahkan dengan menggunakan teknologi mekanisasi, sehingga sampah ini mempunyai nilai ekonomi, yang selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta, yang hasilnya digunakan untuk membantu membiayai operasional dan pemeliharaan sarana prasarana.

Bidang Ekonomi

Dalam mewujudkan ekonomi Kabupaten Wonosobo yang maju dan berdaya saing, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital berperan dalam mendukung pemasaran atau *marketing* dengan cakupan yang lebih luas, melalui media-media sosial yang lebih efisien dibandingkan dengan cara yang konvensional, meskipun unsur konvensional tidak dapat ditinggalkan sepenuhnya.

Selain dukungan pemasaran, teknologi digital di era industri 5.0 saat ini memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam hal pembayaran, yakni dengan adanya pembayaran berbasis elektronik atau e-Money. Kedua dukungan tersebut yang akan kami terapkan bertahap, guna mempermudah jangkauan antara pembeli dan penjual.

Disamping itu, dalam meningkatkan masyarakat pedagang yang berdaya saing dan berwawasan luas, serta menuju proses perdagangan yang lebih modern, Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan meningkatkan media informasi yang mendukung peningkatan pengetahuan pedagang, baik dari sisi penampilan barang yang dijual ataupun perilaku ramah.

B. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang direncanakan pada RAPBD Tahun Anggaran 2025, memang masih tergantung pada pendapatan transfer Pusat maupun Provinsi. Namun demikian, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah mencapai 17,12% dari total pendapatan daerah yang direncanakan. Terdapat kenaikan target PAD sebesar 20,28% dibandingkan dengan target PAD pada tahun 2024. Komponen jenis pendapatan yang memberikan kontribusi kenaikan PAD sebagai berikut :

- Pajak Daerah naik sebesar **68 Miliar 680 Juta Rupiah**. Kenaikan tersebut karena mulai tahun 2025, Kabupaten mendapatkan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari Provinsi.
- Retribusi daerah naik cukup signifikan sebesar **161 Miliar 304 Juta 497 Ribu 582 Rupiah**. Kenaikan tersebut disebabkan karena pendapatan BLUD, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beralih menjadi retribusi pelayanan kesehatan dan kenaikan retribusi pemanfaatan aset daerah.

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan PAD antara lain :

1. Dalam rangka meningkatkan opsen Pajak PKB dan BBNKB, akan dilakukan sosialisasi dan pendataan terkait pemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo, sebagai tindak lanjut Program Sengkuyung yang dicanangkan Provinsi pada akhir tahun 2024, serta bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam upaya penagihan pajak.
2. Melakukan optimalisasi Pajak Barang dan Jasa tertentu seperti usaha makanan dan minuman, usaha perhotelan khususnya *homestay* dan usaha kesenian serta hiburan seperti karaoke, dan usaha pariwisata yang dikelola oleh swasta.

3. Penyesuaian NJOP yang telah dilakukan pada tahun 2024 dengan rata-rata sebesar 15%, diharapkan terdapat peningkatan PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB.
4. Pada tahun 2025 akan mulai diberlakukan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bagi usaha penambangan galian C.
5. Penyesuaian tarif retribusi, baik retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu sesuai dengan regulasi terbaru, diharapkan juga turut berkontribusi dalam kenaikan PAD.
6. Selain itu, pembinaan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak tertib juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya penagihan pajak.

Pendapatan transfer yang tertuang dalam RAPBD Kabupaten Wonosobo tahun anggaran 2025, merupakan proyeksi pendapatan daerah yang disusun berdasarkan KUA dan PPAS tahun 2025, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2022 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, apabila dibandingkan dengan pendapatan transfer Pemerintah Pusat pada *draft* awal RAPBD 2025 adalah sebagai berikut :

1. Bagi hasil pajak/bukan pajak semula direncanakan **35 Miliar 523 Juta 986 Ribu Rupiah**, dan sesuai informasi resmi sejumlah **42 Miliar 795 Juta 707 Ribu Rupiah**, naik **10 Miliar 271 Juta 721 Ribu Rupiah**, dimana kenaikan sebesar **6 Miliar 912 Juta 851 Ribu Rupiah** adalah kenaikan DBHCHT.
2. Dana Alokasi Umum semula direncanakan **854 Miliar 879 Juta 952 Ribu Rupiah** dan sesuai informasi resmi sejumlah **880 Miliar 149 Juta 101 Ribu Rupiah**, naik **25 Miliar 269 Juta 149 Ribu Rupiah**.
3. DAK Fisik semula direncanakan **126 Miliar 845 Juta 062 Ribu Rupiah**, dan sesuai informasi resmi sejumlah **44 Miliar 425 Juta 785 Ribu Rupiah**, turun **82 Miliar 419 Juta 277 Ribu Rupiah**.
4. DAK Non Fisik semula direncanakan **309 Miliar 685 Juta 780 Ribu Rupiah**, dan sesuai informasi resmi sejumlah **333 Miliar 497 Juta 091 Ribu Rupiah**, naik **23 Miliar 811 Juta 311 Ribu Rupiah**.

C. Belanja Daerah

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Daerah, penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah harus dapat memenuhi belanja wajib yang telah ditentukan atau *mandatory spending*, yaitu :

1. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan,
2. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa,
3. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah,
4. Belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah dipublikasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemenuhan belanja wajib dimaksud dalam RAPBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

Selain itu, dengan telah dipublikasikannya informasi resmi dana transfer pemerintah pusat ke daerah, maka perlu adanya penyesuaian terhadap pendapatan daerah dan belanja daerah, terutama belanja daerah yang merupakan belanja wajib atau *mandatory spending*.

D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerapkan kebijakan defisit anggaran, dimana Pemerintah Daerah memungkinkan untuk memasang anggaran belanja daerah melebihi pendapatan daerah, yang nantinya kekurangan atas selisih belanja dan pendapatan tersebut akan ditutup dengan realisasi SiLPA tahun sebelumnya.

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional, dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2025, yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Terkait dengan realisasi SiLPA yang tinggi dapat saya sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Perkiraan SiLPA tahun anggaran 2024 yang dipasang sebagai sumber pembiayaan penerimaan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2025 sejumlah **10 Miliar 695 Juta 224 Ribu 101 Rupiah**, merupakan proyeksi SiLPA yang bersifat bebas penggunaan, sebagai salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah sebagaimana direncanakan pada tahun 2025 sesuai dengan RKPD, KUA dan PPAS tahun 2025.
2. Proyeksi SiLPA yang bersifat bebas penggunaan tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi *over* estimasi yang dapat berdampak pada rasionalisasi belanja daerah yang telah direncanakan. Pada sisi yang lain, apabila terjadi kondisi yang sebaliknya, bahwa realisasi SiLPA setelah berakhirnya tahun anggaran 2024 terdapat selisih lebih, maka dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan baru, maupun permasalahan tidak tercapainya target pendapatan daerah yang direncanakan pada tahun 2025, yang disesuaikan melalui mekanisme perubahan APBD tahun anggaran 2025.

3. Disamping itu, kita perlu mempertimbangkan bahwa komponen SiLPA secara akumulatif termasuk di dalamnya adalah sisa anggaran yang bersifat khusus, yang penggunaannya bersifat mengikat untuk dialokasikan kembali pada kegiatan-kegiatan khusus seperti sisa anggaran DBHCHT, sisa anggaran pada BLUD, sisa anggaran pada Satuan Pendidikan, dan sisa kewajiban (hutang) Pemerintah Daerah yang belum terbayarkan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun sebelumnya, dan/atau yang diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Penyertaan Modal Pada PDAM

Penyertaan modal pada PDAM yang dianggarkan pada RAPBD Tahun Anggaran 2025, yang didasarkan pada RKPD Tahun 2025 dan KUA PPAS Tahun 2025 sebesar **7 Miliar 080 Juta Rupiah**, sumber pembiayaannya berasal dari Hibah Pemerintah Pusat. Berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2022 Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, pada tahun 2025 Kabupaten Wonosobo sudah tidak mendapatkan hibah tersebut, sehingga pada pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025 akan disesuaikan.

F. Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu berupaya agar pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dapat terlaksana segera setelah ditetapkannya APBD. Proses perencanaan infrastruktur yang dimulai sejak APBD disahkan, memungkinkan pekerjaan fisik dimulai segera di awal tahun. Perencanaan T-1 juga merupakan salah satu opsi yang bisa dilakukan, sehingga pelaksanaan fisik dapat dimulai di awal tahun anggaran. Tentu saja, proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu melakukan evaluasi, baik dari proses perencanaan anggaran, penetapan dan pelaksanaan APBD, termasuk juga dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga butuh koordinasi dan peran yang kuat antara eksekutif dan legislatif, untuk bersama-sama memastikan proses penyusunan APBD tepat waktu, proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan pekerjaan infrastruktur bisa segera dilaksanakan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD dan hadirin rapat paripurna yang saya hormati,

Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas segala saran dan masukan maupun koreksi terhadap RAPBD Tahun 2025, baik terkait upaya pencapaian target pendapatan 2025 yang sesuai kewenangan daerah, proses perencanaan dan penganggaran, serapan anggaran maupun pelaksanaan program prioritas tahun 2025.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap rencana APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Selanjutnya mohon perkenan untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Wonosobo.

Sekian dan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Plt. BUPATI WONOSOBO
ttd
Drs. H. MUHAMMAD ALBAR, M.M.